

**PENGANTAR KETUA FKP MPR-RI MENGENAI PEMBAHASAN
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN/MANDATARIS MPR
Serta Penjelasan Mengenai Kondisi Ekonomi Yang Mempengaruhi Pembangunan
Dalam Dua Tahun Terakhir Repelita VI**

Jakarta, 28 Agustus 1998

Presiden/Mandataris akan menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban di depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 1 Maret 1998. Dalam pidato tersebut Presiden/Mandataris melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun jabatan Presiden yaitu mulai tahun 1993/94 sampai dengan tahun 1997/98. Lima tahun jabatan presiden ini mencakup pelaksanaan tahun terakhir Repelita V dan empat tahun Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI), yang merupakan awal dari pembangunan jangka panjang (PJP) II. Pembangunan dalam Repelita VI adalah merupakan pelaksanaan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993.

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, para Menteri dan pejabat setingkat Menteri, dalam Kabinet Pembangunan VI. Kabinet Pembangunan VI bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan pada tahun terakhir Repelita V, menyusun Repelita VI, melaksanakan pembangunan pada empat tahun Repelita VI (1994/95 – 1997/98), dan merancang pelaksanaan pembangunan tahun terakhir Repelita VI yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Presiden yang akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum-nya pada bulan Maret 1998. Dalam melaksanakan tugasnya Kabinet Pembangunan VI berpedoman pada Panca Krida Kabinet Pembangunan VI.

Laporan Presiden/Mandataris MPR tersebut dilengkapi dengan Lampiran yang secara lebih rinci menguraikan perkembangan pembangunan selama masa jabatan Presiden/ Mandataris tersebut.

Lampiran pidato ini disajikan dalam 26 bab yang termuat dalam tiga buku. Ikhtisarnya ada dalam Bab I, Bab Umum. Selain itu, dilampirkan pula Buku Peta Prasarana Indonesia, yang telah dibangun selama ini dan berfungsi pada tahun keempat Repelita VI.

Dalam mengkaji dan menilai materi pertanggungjawaban Presiden/Mandataris tersebut, beberapa pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama, amanat GBHN 1993 telah dijabarkan dalam Repelita VI. Dalam proses penjabaran tersebut Repelita VI telah menampung aspirasi masyarakat yang seluas-luasnya serta telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, sasaran umum Repelita VI menurut GBHN 1993 adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peranserta, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin. Adapun prioritas Repelita VI adalah sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga, untuk dapat mengukur kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh pembangunan, dalam mewujudkan sasaran umum Repelita VI dengan prioritas seperti tersebut di atas ditetapkan berbagai sasaran, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Keempat, pembangunan merupakan upaya bersama seluruh rakyat Indonesia. Dalam Repelita VI peranserta masyarakat dalam pembangunan telah tumbuh pesat, sesuai dengan petunjuk GBHN 1993 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, dan bahwa masyarakat adalah pelaku utama pembangunan.

Kelima, sampai dengan tahun ketiga Repelita VI, sebagian besar sasaran, telah terpenuhi atau terlampaui. Walaupun gejolak moneter melanda perekonomian Indonesia sejak paruh kedua tahun 1997, banyak sasaran tahun keempat Repelita VI masih dapat dicapai bahkan beberapa sasaran akhir Repelita VI telah dapat dilampaui. Namun demikian berbagai kondisi, terutama sebagai dampak gejolak moneter dan gangguan terhadap perekonomian nasional karena kekeringan yang berkepanjangan mengakibatkan sejumlah sasaran akhir Repelita VI sulit dapat tercapai.

Keenam, kondisi ekonomi dan keuangan yang bergejolak dewasa ini sedang diupayakan untuk dipulihkan. Sebelum pulih kembali, keadaan masih akan sulit, dan bahkan mungkin diperlukan berbagai pengorbanan. Namun, segera setelah masa penyesuaian dapat dilewati, kondisi ekonomi Indonesia bukan hanya akan pulih kembali bahkan diharapkan akan lebih kuat lagi, oleh karena kelemahan-kelemahan yang ada selama ini telah terkikis sehingga pertumbuhan selanjutnya berlangsung di atas landasan yang lebih kukuh dan berkesinambungan.

Selanjutnya mengenai bagian yang terakhir ini, ingin saya jelaskan agak lebih luas sebagai latar belakang. Hal ini saya anggap penting, oleh karena masalah yang kita hadapi dewasa ini berpengaruh besar pada pelaksanaan pembangunan dalam Repelita VI, sehingga perlu ada kejelasan dan pemahaman yang sama dari setiap anggota F-KP MPR-RI mengenai masalah-masalah yang kita hadapi itu.

Perubahan lingkungan internasional ditandai oleh semakin terbukanya hubungan antarbangsa didorong oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, yang menyebabkan makin lancarnya arus komunikasi dan perdagangan. Perubahan ini membawa dampak menguntungkan tetapi juga besar risikonya. Di bidang ekonomi, dampak yang menguntungkan kita peroleh antara lain dari meningkatnya sumber-sumber pembiayaan investasi dari luar negeri berupa arus modal masuk. Selain itu, ekspor kita meningkat. Jenis komoditi yang kita ekspor juga makin beragam.

Namun keterbukaan perekonomian itu juga dapat membawa dampak yang sebaliknya. Gejolak ekonomi internasional menjadi lebih besar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Dalam lima tahun terakhir perekonomian dunia secara keseluruhan mengalami pemulihan setelah pada awal tahun 1990-an mengalami kelesuan. Pertumbuhan ekonomi dunia terus meningkat dari 2,6 persen pada tahun 1993 hingga diperkirakan mencapai 4,1 persen pada tahun 1997. Membaiknya perekonomian dunia tersebut didorong oleh pulihnya perekonomian negara-negara maju. Negara-negara transisi yang perekonomiannya berangsur membaik juga turut mendorong pemulihan perekonomian dunia. Proses pemulihan perekonomian dunia tersebut didorong antara lain oleh ekspansi moneter dan turunnya suku bunga di negara-negara industri dan didukung oleh stabilitas ekonomi makro.

Perkembangan perekonomian internasional tersebut di atas mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional. Menguatnya ekonomi negara maju telah mendorong semakin derasny arus modal ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Modal luar negeri yang keluar-masuk dalam jumlah besar terutama yang bersifat jangka pendek, pada kurun waktu 1990-an tersebut rentan terhadap perubahan sentimen pasar, dan dapat menimbulkan gejolak keuangan. Masalah (perubahan sentimen pasar) inilah yang terjadi pada perekonomian Indonesia dan beberapa negara lain di kawasan ini sejak pertengahan tahun 1997, yang mengakibatkan gejolak moneter yang dampaknya masih berlangsung sampai saat ini. Sentimen pasar berubah setelah menyadari bahwa mata uang negara-negara Asia Tenggara dihargai terlalu tinggi (*overvalued*) sehingga defisit transaksi berjalan membengkak.

Jadi sesungguhnya kondisi yang menuju ke arah krisis itu sudah dimulai sebelum terjadinya krisis keuangan di Thailand pada awal 1997. Namun krisis moneter di Thailand itu yang memicu krisis di kawasan Asia Tenggara.

Perkembangannya berlangsung sangat cepat dan memang sulit untuk diperkirakan sebelumnya. Negara-negara yang mengalami gejolak ekonomi adalah negara-negara yang tumbuh

pesat (emerging) di Asia yang pada dasarnya cukup baik fundamental ekonomi makronya. Meskipun sumber yang memicu kejadian itu datang dari luar, kita juga harus mengakui, bahwa ada unsur-unsur dalam perekonomian kita yang turut memperberat masalahnya. Perkembangan dunia perbankan kita yang demikian pesat, kurang diikuti oleh kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Selama empat tahun Repelita VI kredit perbankan meningkat sebesar Rp 232,1 triliun atau naik rata-rata 25,4 persen per tahun, dan mencapai puncaknya pada tahun 1997/98 yaitu sebesar 27,2 persen. Menurut sektor ekonomi, penyaluran kredit kepada sektor jasa-jasa mencatat peningkatan tercepat, yaitu rata-rata sebesar 34,0 persen per tahun. Sejak tahun 1995/96 terjadi pergeseran penyaluran kredit di mana pangsa penyaluran kredit kepada sektor jasa-jasa melampaui pangsa penyaluran kepada sektor barang, yang terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan perindustrian. Di dalamnya berperan besar kredit untuk sektor properti, yang antara lain kemudian menjadi penyebab dari besarnya kredit bermasalah.

Demikian pula dengan investasi swasta yang dilakukan di berbagai bidang, tidak sedikit yang lebih besar pasak daripada tiang dan banyak yang mengandalkan pada pinjaman luar negeri. Akibatnya hutang swasta menggelembung tanpa terkendali.

Apabila stok hutang pemerintah justru menurun, dari US\$ 55,0 miliar dari seluruh pinjaman luar negeri kita, pada tanggal 31 Maret 1994, menjadi US\$ 54,1 miliar pada 31 Desember 1997, hutang swasta (termasuk BUMN) justru meningkat dari US\$ 28,3 miliar menjadi US\$ 82 miliar atau meningkat hampir 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 4 tahun saja. Hutang pemerintah, yang pada tanggal 31 Maret tahun 1994 adalah 66,1 persen, pada 31 Desember 1997 telah berkurang menjadi 39,8 persen.

Hal ini pada gilirannya memicu permintaan terhadap mata uang asing, khususnya Dollar Amerika, yang cukup besar untuk mengembalikan pinjaman swasta yang telah jatuh tempo dan kemudian banyak yang tidak diperpanjang karena ada krisis tersebut, sehingga membuat krisis menjadi lebih dalam lagi. Di samping itu, pengaruh negatif dari perdagangan valuta asing ikut memperkeruh dan telah meningkatkan intensitas krisis.

Sejak terjadinya gejolak moneter pada tahun 1997 berbagai langkah kebijaksanaan telah diupayakan untuk dapat mengatasinya dan memulihkan stabilitas ekonomi dan keuangan. Ternyata perkembangan selanjutnya makin memburuk, bahkan nilai tukar Rupiah sempat berfluktuasi dalam kisaran Rp 10.000 per US Dollar, yang berarti telah terjadi depresiasi lebih kurang 75 persen dibanding sebelum terjadinya krisis.

Gejolak ini mempunyai dampak berantai yang sangat luas. Pertama, perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai hutang luar negeri dan tidak mengasuransikannya (*hedge*) mengalami kesulitan melunasi pokok dan bunga hutangnya. Akibat lanjutannya adalah makin meningkatnya kredit macet di sektor perbankan. Keadaan ini telah menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional akan prospek perekonomian Indonesia. Bahkan *Letter of Credit* (L/C) yang dikeluarkan oleh bank swasta nasional sempat tidak diterima oleh eksportir asing, sehingga menimbulkan hambatan terhadap impor, termasuk bahan baku dan bahan kebutuhan pokok, yang sangat diperlukan oleh perekonomian Indonesia.

Akibatnya, harga bahan baku dan barang antara (*intermediate goods*), terutama yang diimpor, meningkat. Kenaikan tersebut pada akhirnya harus diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Bahkan pada bulan Januari 1998 lalu, inflasi mencapai sekitar 6,9 persen. Inflasi dalam tahun anggaran 1997/98 sampai dengan Januari telah mencapai 16 persen. Padahal inflasi pada tiga tahun pertama Repelita VI cukup terkendali (satu *digit*) yaitu 8,6 persen pada tahun 1994/95, 8,9 persen pada tahun 1995/96 dan 5,2 persen pada tahun 1996/97. Jadi telah mengarah pada sasaran laju inflasi 5 persen pada akhir Repelita VI.

Di samping kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan yang hampir 90 persen bahan bakunya diimpor serta berbagai bahan medis penting juga mengalami goncangan. Persediaan obat-obatan, peralatan keluarga berencana, serta kebutuhan bahan medis di rumah sakit dan PUSKEMAS menjadi sangat terbatas. Juga telah terjadi krisis pada sektor peternakan, yang akan

membuat produksi ayam potong dan produksi telur berkurang, disebabkan karena mahalnnya harga makanan ayam yang kebanyakan masih diimpor. Demikian pula ada kelangkaan pada produk peternakan lainnya, terutama susu yang masih banyak harus diimpor

Gejolak moneter ini telah mengakibatkan kelesuan di kalangan dunia usaha, yang berakibat pada bertambahnya pengangguran. Kedua masalah ini, inflasi dan pengangguran yang meningkat, menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun. Akibatnya dapat meningkat pula kerawanan sosial dan ancaman bagi stabilitas politik.

Selain gejala ekonomi, kita juga mengalami kekeringan yang disebabkan oleh gejala alam El Nino yang mempengaruhi kawasan Asia. Musim kekeringan berkepanjangan berdampak langsung terhadap produksi sektor pertanian, di samping mengakibatkan kebakaran hutan di beberapa daerah. Memasuki tahun 1998, keterlambatan musim tanam dan panen akibat terlambatnya musim hujan tidak dapat mendorong sektor pertanian untuk segera kembali pulih.

Sektor pertanian yang diharapkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada saat yang sulit ini tidak dapat tumbuh secepat yang diharapkan. Diperkirakan oleh BPS produksi padi tahun 1998 akan berkurang dibanding tahun 1997, yang sudah jauh berkurang dibanding tahun 1996. Akibatnya ketersediaan komoditi pangan berkurang, dan akhirnya berpengaruh pada laju inflasi. Biasanya sektor konstruksi di perkotaan dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari perdesaan dalam musim kemarau. Namun krisis ekonomi yang berdampak pada sektor konstruksi berdampak pada penurunan tenaga kerja musiman yang bisa diserap.

Untuk menanggulangi berbagai dampak yang sangat merugikan ini, telah diupayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat mendesak (*crash program*). Melalui program ini diupayakan peningkatan produksi pangan dengan menekan kehilangan hasil panen, serta meningkatkan mutu intensifikasi dan pemanfaatan lahan-lahan 'tidur' (tidak produktif). Namun demikian untuk menjaga stabilitas harga pangan, masih perlu diimpor beras dan berbagai bahan pangan seperti terigu, gula, dan kedelai. Selain upaya meningkatkan ketersediaan pangan, juga masih diperlukan subsidi guna menghindari lonjakan harga ditingkat konsumen.

Melalui program padat karya diupayakan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Kegiatan *crash program* ini diarahkan kepada pekerja musiman dan yang berketerampilan rendah di daerah perkotaan dan perdesaan, yang kegiatannya mencakup rehabilitasi atau pembangunan jalan desa, saluran irigasi, penghijauan dan penghutanan kembali, dan usaha-usaha produktif lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Upaya padat karya sebagai program khusus tersebut akan dilanjutkan dalam tahun anggaran 1998/99. Selain itu, dalam penyusunan anggaran tahun mendatang, program-program penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan tetap diprioritaskan. Anggaran rupiah yang didaerahkan mencapai tiga per lima dari seluruh tabungan pemerintah. Dengan alokasi ini diharapkan daerah dapat memelihara momentum pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, diarahkan agar pelaksanaannya secara maksimal dengan padat karya. Proyek-proyek sektoral juga diarahkan untuk sejauh mungkin menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Bahkan proyek-proyek bantuan luar negeri juga diupayakan untuk dilakukan dengan padat karya.

Selain itu, dikembangkan pula kegiatan untuk menampung tenaga kerja yang berketerampilan, dengan titik berat pada pengembangan wirausaha, karena perusahaan-perusahaan diperkirakan belum bisa segera memperluas kesempatan kerja, bahkan mungkin juga belum dapat menampung kembali tenaga kerja sebanyak yang di-PHK.

Selain upaya-upaya untuk mengurangi dampak krisis ekonomi ini yang sering disebut juga sebagai *social safety net programs*, telah dilakukan pula upaya-upaya yang bersifat jangka menengah dan panjang.

Kita berupaya untuk memantapkan ketahanan pangan, selain dengan menekan kehilangan hasil panen dan meningkatkan mutu intensifikasi juga memperluas areal tanam serta meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan irigasi dan pasang surut antara lain di lahan gambut.

Upaya khusus meningkatkan produksi ini mencakup lahan padi seluas 2,3 juta hektar, lahan jagung seluas 540 ribu hektar, lahan kedele seluas 527 ribu hektar, dan lahan ubi kayu seluas 14 ribu hektar. Selain itu kita akan memanfaatkan lahan HTI untuk tanaman sela secara tumpang-sari.

Pada tataran makro langkah-langkah untuk mengatasi gejolak moneter telah diambil sejak awal. Misalnya, penjadwalan kembali proyek-proyek dan revisi penggunaan anggaran pembangunan, di samping pengetatan likuiditas melalui instrumen moneter.

Juga telah disusun program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan yang menyeluruh dan mencakup berbagai bidang. Program-program itu meliputi bidang moneter, perbankan, fiskal, perdagangan dalam dan luar negeri, investasi dan perbaikan kinerja BUMN. Sejak diumumkannya pada pertengahan bulan Januari 1998 yang lalu program reformasi ini telah banyak yang dilaksanakan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; penyelesaian hutang luar negeri swasta; pemberian jaminan atas deposito masyarakat dan pinjaman perbankan; merger Bank BUMN dan penetapan batas minimal modal bank swasta; penghapusan pembatasan tata niaga berbagai komoditi; dan berbagai langkah lain yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat, melancarkan perdagangan dan akhirnya menggerakkan kembali perekonomian.

Dalam menghadapi krisis ini, kita telah meminta bantuan dari berbagai lembaga internasional yang mempunyai pengalaman luas dalam membantu pembangunan di berbagai negara, terutama IMF dan juga Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, serta negara-negara sahabat, baik di kawasan kita ini maupun negara-negara yang tergabung dalam G-7. Bentuk bantuannya beragam. Ada yang berbentuk bantuan keuangan, bantuan keahlian teknis, dan dukungan untuk kelancaran perdagangan terutama untuk impor bahan baku dan kebutuhan pokok.

Dalam rangka itu pula, Pemerintah telah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1998/99 yang telah diajukan ke DPR pada awal Januari, untuk lebih mendekati proyeksi-proyeksi anggaran pada perkembangan terakhir dan perkiraan satu tahun ke depan perekonomian Indonesia. Revisi tersebut didasarkan atas perubahan beberapa asumsi pokok, yaitu perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dari Rp 4.000/US Dollar menjadi Rp 5.000/US Dollar, perubahan pertumbuhan ekonomi dari 4 persen menjadi 0 persen, dan perubahan laju inflasi dari 9 persen menjadi 20 persen.

Dalam melaksanakan reformasi dan restrukturisasi itu, tujuan pertama adalah memulihkan kepercayaan terhadap Rupiah, baik kepercayaan di dalam negeri maupun kepercayaan dunia internasional. Hal ini teramat penting, karena jika kepercayaan itu tidak dapat segera dipulihkan, perekonomian kita akan dapat menjadi lebih buruk keadaannya. Bagi dunia usaha, nilai Rupiah yang lemah menyebabkan meningkatnya ongkos produksi, karena sebagian bahan baku dan suku cadang bagi mesin-mesinnya masih memerlukan impor. Kenaikan biaya produksi itu tidak sepenuhnya dapat dibebankan pada masyarakat, karena akan menjadi tidak terbeli oleh masyarakat. Apalagi kalau nilainya bergejolak, beban yang sudah berat itu ditambah lagi dengan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi. Rencana investasi dan produksi menjadi tidak menentu. Bagi penanam modal asing, ketidakpastian itu dapat menurunkan minat investasi ke negara kita. Keadaan ini menyebabkan kegiatan swasta, yang kita harapkan berfungsi sebagai penggerak perekonomian, menjadi lumpuh. Pada gilirannya, penyerapan tenaga kerja menjadi makin berkurang.

Jika keadaan seperti sekarang ini berlangsung berkepanjangan, perekonomian dapat mengalami pertumbuhan negatif dengan inflasi yang sangat tinggi, suatu keadaan yang tidak pernah kita alami selama Orde Baru.

Oleh karena itu prioritas utama kita sekarang ini adalah mengembalikan nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar. Memang tidak diharapkan akan kembali seperti semula, yaitu sekitar Rp 2.500 per dolar AS, karena dalam tingkat itu Rupiah *overvalued*, tetapi di atas Rp 5.000/6.000, sesungguhnya Rupiah menurut perkiraan sudah *undervalued*. Depresiasi mata uang negara-negara lain yang terkena krisis ini berkisar antara 13 - 48 persen.

Proses penyesuaian kembali perekonomian ini diperkirakan masih akan berlangsung dalam satu, dua atau tiga tahun ke depan.

Namun, beberapa sektor seperti pertanian, industri dan pertambangan terutama yang bertumpu pada sumber daya dalam negeri diperkirakan akan dapat menguat kembali dalam waktu yang relatif lebih cepat. Bahkan sekarang banyak yang ekspornya telah terdorong dengan kuat. Tingginya nilai tukar valuta asing terhadap rupiah menyebabkan sektor-sektor tersebut menjadi lebih kompetitif.

Meskipun ekonomi Indonesia dewasa ini dalam gejolak, namun dasar-dasarnya yang telah dibangun selama ini memberikan landasan yang cukup kuat. Demikian pula prasarana yang telah dibangun dan sumber daya manusia yang telah meningkat kualitas dan kemampuannya, serta sumber daya alam yang kita miliki merupakan modal yang kuat bagi tumbuh kembalinya kekuatan ekonomi.

Setelah lewat masa penyesuaian itu, ekonomi Indonesia diharapkan akan pulih kembali. Setelah proses reformasi ini berjalan dan masa transisi dilewati, inflasi dan suku bunga akan turun kembali, dan potensi pertumbuhan akan meningkat lagi. Pertumbuhan investasi dan ekspor akan meningkat, bahkan dengan lebih kukuh. Kesempatan kerja akan terbuka kembali. Daya beli masyarakatpun akan menguat. Proses penyesuaian produksi diharapkan sudah selesai sehingga mesin perekonomian siap untuk bergerak cepat kembali pada Repelita VII. Dengan depresiasi Rupiah dan program reformasi ekonomi itu, maka memasuki abad ke-21 perekonomian Indonesia diharapkan akan menjadi lebih kukuh dan kompetitif, sehingga ketahanan ekonomi akan menjadi lebih mantap.